

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
BERBASIS AKRUAL PADA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

SKRIPSI

OLEH

BERNADET NAULI MARBUN
NIM : 16622160



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG**

2020

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
BERBASIS AKRUAL PADA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

oleh:

**NAMA : BERNADET NAULI MARBUN
NIM :16622160**

PROGRAM STUDI S1AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2020**

TANDA PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
BERBASIS AKRUAL PADA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Diajukan Kepada:

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh:

Nama: Bernadet Nauli Marbun
Nim: 16622160

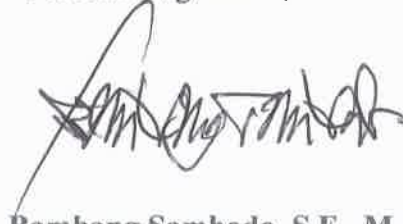
Menyetujui:

Pembimbing Pertama,



Nurfitri Zulaika, S.E., M.Ak., Ak., CA
NIDN: 1028117701 / Asisten Ahli

Pembimbing Kedua,



Bambang Sambodo, S.E., M.Ak.
NIDK: 8833900016 / Asisten Ahli

Mengertahui:
Ketua Program Studi



Hendy Satria, S.E., M.Ak
NIDN: 1015069101 / Lektor

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
BERBASIS AKRUAL PADA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Nama : Bernadet Nauli Marbun
Nim : 16622160

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh (Desember 2020) Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua,



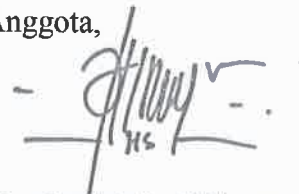
Nurfitri Zulaika, S.E., M.Ak., Ak., CA
NIDN. 1028117701 / Asisten Ahli

Sekretaris,



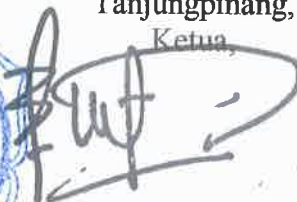
Rachmad Chartady, S.E., M.Ak
NIDN. 1021039101 / Asisten Ahli

Anggota,



Hendy Satria, S.E., M.Ak
NIDN: 1015069101 / Lektor

Tanjungpinang, Desember 2020
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang,



Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA
NIDN. 1029127801/ Lektor

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bernadet Nauli Marbun
Nim : 16622160
Tahun Angkatan : 2016
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,51
Program Studi/ Jenjang : Akuntansi / Strata 1
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi
Berbasis Akrual Pada Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Kepulauan Riau

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dalam skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata dikemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, Desember 2020

Penyusun



BERNADET NAULI MARBUN
NIM: 16622160

MOTTO

” Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan”

(Yeremia 17 : 7)

“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang:

(Amsal 23 : 18)

”Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku”

(Filipi 4 : 13)

“Be Faithful in small things because it is in them that your strength lies”

(Mother Teresa)

Joy is prayer; joy is strength; joy is love; joy is a net of love by which you can catch souls.”

(Mother Teresa)

PERSEMBAHAN

Segala Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat dan pertolongan-Nya, sehingga skripsi ini bisa selesai dengan perjuangan yang luar biasa dan dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini sebagai bentuk tanggung jawab, bakti, dan ungkapan terima kasih saya kepada

Ayah dan Ibuku yang paling kucintai

Terima kasih atas doa, kasih sayang, kesabaran dan pengorbanan yang tiada terhingga untuk mengiringi setiap langkah dalam hidupku.

Oppung dan Adikku tersayang

yang selalu mendoakanku, memotivasi dan mendukungku setiap waktu.

Almamaterku tercinta

STIE PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG Tempat aku menuntut ilmu.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau”.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak, baik itu berupa dorongan, nasehat, saran, maupun kritik yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati serta penghargaan yang tulus, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Charly Marlinda, S.E.,M.Ak.,Ak.,CA selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, S.E.,M.Si.,Ak.CA selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, S.E.,Ak.,M.Si.,CA selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Hendy Satria, S.,M.Ak., selaku Plt Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
5. Ibu Nurfitri Zulaika, S.E.,M.Ak.,Ak.,CA selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat dan arahan kepada penulis.
6. Bapak Bambang Sambodo, S.E., M.Ak.selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat dan arahan kepada penulis.
7. Bapak/Ibu Dosen beserta seluruh Staff Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

8. Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
9. Kepada Bapak/Ibu Operator Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akruar di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau yang telah membantu dalam memberikan data penelitian.
10. Keluargaku Tercinta Ayah, Ibu, Oppung dan Adik yang selalu mendoakan, selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis selama perkuliahan sampai detik ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
11. Keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
12. Dan untuk sahabatku dan teman-teman seperjuanganku Akuntansi Malam 3 angkatan 2016 yang turut memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini baik secaralangsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan saran dan kritikan untuk mendapatkan wawasan baru dalam membangun dan menyempurkan skripsi.

Tanjungpinang, Desember 2020

BERNADET NAULI MARBUN

NIM: 16622160

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN MOTTO	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR PUSTAKA	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Batasan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Kegunaan Penelitian.....	6
1.5.1 Kegunaan Ilmiah.....	6
1.5.2 Kegunaan Praktis.....	6
1.6 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Teori.....	9
2.1.1 Akuntansi Sektor Publik.....	9
2.1.2 Laporan Keuangan Pemerintah.....	11
2.1.3 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah.....	13
2.1.4 Perkembangan Akuntansi Pada Pemerintah.....	15

2.1.5	Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI.....	19
2.1.6	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan	22
2.2	Kerangka Pemikiran	23
2.3	Penelitian Terdahulu.....	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		27
3.1	Jenis Penelitian	27
3.2	Jenis Data.....	28
3.2.1	Data Primer	28
3.2.2	Data Sekunder.....	28
3.3	Teknik Pengumpulan Data	29
3.4	Teknik Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		32
4.1	Hasil Penelitian.....	32
4.1.1	Sejarah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau	32
4.1.2	Visi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau	33
4.1.3	Misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau	33
4.1.4	Struktur Organisasi.....	34
4.1.5.3	Hambatan yang dihadapi dalam Penerapan Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI	50
4.2	Pembahasan	50
4.2.1	Penerapan Sistem Akuntansi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau	50
4.2.2	Analisis Perbandingan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau dengan PP 71 Tahun 2010	63

4.2.3 Hambatan yang dihadapi dalam Penerapan Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI	63
--	----

BAB V PENUTUP	68
5.1 Kesimpulan.....	68
5.2 Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Perbedaan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah SAP Kas Menuju AkruaI Dan SAP AkruaI	15
Tabel 4.1	Rekapitulasi Penyajian Pada Laporan Realisasi Anggaran.....	36
Tabel 4.2	Rekapitulasi Penyajian Pada Neraca	38
Tabel 4.3	Rekapitulasi Penyajian Pada Laporan Operasional.....	39
Tabel 4.4	Rekapitulasi Penyajian Pada Laporan Perubahan Ekuitas	42
Tabel 4.5	Rekapitulasi Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan	43
Tabel 4.6	Analisis Perbandingan SAIBA Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan	44

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1	Proses Akuntansi pada Entitas Akuntansi	22
Gambar 2.2	Kerangka Pemikiran Penelitian	24
Gambar 4.1	Struktur Organisasi	35
Gambar 4.2	Laporan Realisasi Anggaran.....	54
Gambar 4.3	Neraca.....	56
Gambar 4.4	Laporan Operasioanal.....	58
Gambar 4.5	Laporan Perubahan Ekuitas	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019
Lampiran 2	: Neraca Tahun 2019
Lampiran 3	: Laporan Operasional Tahun 2019
Lampiran 4	: Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2019
Lampiran 5	: Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2019
Lampiran 6	: Surat Selesai Penelitian
Lampiran 7	: Plagiarism
Lampiran 8	: Curriculum Vitae

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Bernadet Nauli Marbun, 16622160 S1 Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
Email: bernadetnauli.tpi@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara, dan data sekunder berupa dokumentasi berupa Laporan Keuangan yang dihasilkan dari aplikasi SAIBA pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau.

Hasil dari penelitian yang dilakukan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau diperoleh bahwa tidak semua komponen laporan keuangan yang dimaksud dalam PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah disajikan melalui aplikasi SAIBA. Beberapa komponen laporan keuangan yang dimaksud dalam PP 71 tahun 2010 yang tidak dihasilkan SAIBA yaitu Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas (LAK) karena Kementerian Agama merupakan instansi non Badan Layanan Umum (BLU) yang tidak memiliki pendapatan dan kas. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan telah sesuai PP 71 Tahun 2010. Hambatan dalam penerapan SAIBA yaitu aplikasi SAIBA terkadang *error* sehingga data tidak terbaca, dan sistem tidak sinkron, Sumber Daya Manusia (SDM) dari latar belakang ekonomi sedikit, sehingga beberapa pegawai harus merangkap jabatan

Kesimpulan secara umum bahwa Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau sudah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual sesuai dengan PP 71 tahun 2010, adapun masalah Sumber Daya manusia (SDM) dan latar belakang pendidikannya. Perlu perbaikan pada pemetaan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan bagaimana cara melakukan pengelolaan keuangan dengan aplikasi berbasis akrual (SAIBA).

Katakunci : Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA), PP 71 tahun 2010, Laporan Keuangan

Referensi : 12 (10 buku + Peraturan Pemerintah + Kemenag)
Dosen Pembimbing I : Nurfitri Zulaika, S.E. M.Ak.CA
Dosen pembimbing II : Bambang Sambodo, S.E. M.Ak

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF ACCRUAL-BASED INSTITUTIONAL ACCOUNTING SYSTEMS IN REGIONAL OFFICES OF THE MINISTRY OF RELIGION, RIAU ISLANDS

Bernadet Nauli Marbun, 16622160 S1 Department of Accounting, College of Economics (STIE) Tanjungpinang Development.

Email: bernadetnauli.tpi@gmail.com

This study aims to analyze the application of the Accrual-Based Agency Accounting System at the Regional Office of the Ministry of Religion, Riau Islands Province. The method used in this research is descriptive method using a qualitative approach. The data used are primary data in the form of interviews, and secondary data in the form of documentation in the form of financial reports resulting from the application of SAIBA at the Regional Office of the Ministry of Religion, Riau Islands Province.

The results of research conducted at the Regional Office of the Ministry of Religion of the Archipelago Province found that the results of research conducted at the Regional Office of the Ministry of Religion of the Islands Province found that not all components of the financial statements referred to in PP 71/2010 concerning Government Accounting Standards were presented through the SAIBA application. Some of the components of the financial statements referred to in PP 71/2010 that are not produced by SAIBA are the Reports on Changes to the Excess Budget Balance and Cash Flow Reports (LAK) because the Ministry of Religion is a non-Public Service Agency (BLU) institution that has no income and cash. While the Budget Realization Report (LRA), Balance Sheet, Operational Report (LO), and Change in Equity Report (LPE) and Notes to Financial Statements are in accordance with PP 71/2010. Meanwhile, the Budget Realization Report (LRA), Balance Sheet, Operational Report (LO), and Change in Equity Report (LPE) are in accordance with PP 71/2010. Obstacles in implementing SAIBA are the SAIBA application sometimes errors so that data is not legible, and the system is out of sync. Human resources (HR) from an economic background are few, so some employees have concurrent positions

The general conclusion is that the Regional Office of the Ministry of Religion of Riau Islands Province has implemented an accrual-based accounting system in accordance with Government Regulation 71/2010, The human resource (HR) and educational background.. It needs improvement in the mapping of Human Resources through training on how to do financial management using accrual-based applications (SAIBA).

Key categories: Accrual-Based Agency Accounting System (SAIBA), PP 71 of 2010, Financial Statements

Reference: 12 (10 books + Government Regulations + Ministry of Religion)

Supervisor I: Nurfitri Zulaika, S.E. M.Ak.CA

Supervisor II: Bambang Sambodo, S.E. M.Ak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah yang terdiri atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Standarisasi ini dilakukan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan. Sekaligus untuk memberikan peningkatan kualitas dari Laporan Keuangan.

Terdapat dua basis akuntansi atau dasar akuntansi yang dikenal dalam akuntansi, yaitu akuntansi berbasis kas (*cash basis*) dan akrual (*accrual basis*). Metode pencatatan tersebut berbeda pada masalah waktu (*timing*) kapan transaksi tersebut dicatat. Dalam akuntansi basis kas, transaksi tidak diakui/dicatat sampai transaksi secara kas benar-benar diterima atau dikeluarkan. Apabila transaksi tersebut tidak berpengaruh terhadap kas, maka transaksi tersebut tidak akan dicatat. Sedangkan basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi.

Penggunaan basis akrual (*accrual basis*), mengembangkan prinsip dan asumsi bahwa pencatatan transaksi keuangan tidak hanya dilakukan pada saat terjadi penerimaan dan pengeluaran uang. Dengan basis akrual, informasi yang diberikan kepada pemakai tidak hanya terbatas pada transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pengeluaran kas melainkan juga kewajiban yang

membutuhkan penyelesaian kas di masa depan dan informasi lain yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Menurut basis akrual pendapatan dicatat ketika pendapatan tersebut diperoleh, meskipun apabila pendapatan tersebut tidak diterima secara kas sampai jauh di masa mendatang. Begitu pula beban, beban dicatat ketika beban tersebut terjadi, meskipun sebenarnya beban tersebut tidak dibayarkan sampai jauh di masa mendatang. Akuntansi akrual mengakui beban ketika suatu transaksi terjadi.

Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) yang disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga merupakan salah satu bentuk akuntabilitas dalam mewujudkan *good governance*. LKKL yang disusun pada tahun 2005 sebagai bentuk pertanggungjawaban APBN tahun 2004, merupakan LKKL pertama kali yang dihasilkan menteri/ pimpinan lembaga. Penyusunan LKKL berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). LKKL tahun 2004-2014 dihasilkan dari Sistem Akuntansi Keuangan Pengguna Anggaran (SAKPA) dengan basis *Cash Towards Accrual* (CTA). Sejalan dengan amanat reformasi keuangan negara serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, maka sejak tahun 2015 penyusunan LKKL disusun menggunakan akuntansi berbasis akrual. Akuntansi berbasis akrual mengakui pendapatan dan belanja (biaya) bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan, tetapi diakui atau dicatat pada saat transaksi terjadi. Perubahan basis akuntansi dari CTA ke basis akrual disebabkan karena ada beberapa hal yang tidak bisa dipenuhi oleh akuntansi berbasis CTA. Laporan keuangan berbasis CTA belum memperlihatkan kinerja pemerintah secara keseluruhan, tidak menyajikan informasi keuangan yang sesungguhnya, dan kurang memberikan rekam jejak atas perubahan nilai ekuitas pemerintah (Amriani,

2014). Akan tetapi, informasi akuntansi berbasis akrual hanya dapat disajikan secara periodik (semester dan tahunan) menyulitkan penyediaan informasi keuangan secara insidental sebagai dasar pengambilan keputusan. Sesuai dengan teori kegunaan keputusan (*decision usefulness theory*), informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus memberikan manfaat baik bagi penyusun maupun pengguna laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan akuntansi berbasis akrual dimaksudkan untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif dan lebih baik bagi para pemangku kepentingan dibandingkan dengan basis kas menuju akrual (CTA). Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu pengungkapan paripurna atau *full disclosure* (PPAKP, 2014)

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Sistem Akuntansi Instansi yaitu Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Divisi Akuntansi Pelaporan. Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual sebagai tempat untuk menampung dalam penyusunan laporan keuangan yang meliputi Aplikasi Sistem Akuntansi Satuan Kerja (SAS), Aplikasi Persediaan, dan Aplikasi Sistem Akuntansi Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Penyusunan laporan keuangan yang digunakan SAIBA dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun bahwa laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan

Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan(CaLK).

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau adalah perpanjangan tangan dari Kementerian Agama Republik Indonesia di Daerah Provinsi Kepulauan Riau, untuk membantu menjalankan tugas dan fungsi Pemerintah dalam Bidang urusan Agama.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau telah menerapkan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) sejak tahun 2015. Penerapan sistem akuntansi instansi berbasis akrual merupakan proses yang berkesinambungan dan terpadu. Aplikasi yang berkesinambungan antara lain aplikasi Persediaan, SIMAK-BMN, dan aplikasi SAIBA. Dampak yang dihasilkan dari penerapan sistem ini tidak dapat dilihat dalam waktu singkat.

Kementerian Agama adalah Kementerian/Lembaga yang memiliki Satuan Kerja terbanyak di Indonesia ada 4484 Satuan Kerja. Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau khususnya memiliki 8 Satuan Kerja. Melihat banyaknya Satuan Kerja, penulis ingin melihat apakah Kantor Wilayah Kementerian Agama bisa menyelesaikan laporan keuangan tepat waktu. Karena laporan keuangan yang disusun bukan hanya laporan keuangan semester dan tahunan, tetapi juga laporan keuangan bulanan.

Keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual tentu saja dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya, faktor sumber daya manusia seperti tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan staf, dan pelatihan. Sumber daya manusia

dan perangkat pendukungnya memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua

Berdasarkan dari fenomena diatas maka penulis tertarik untuk meneliti fenomena tersebut dengan judul “**Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang sudah dijelaskan dalam latar belakang maka penulis bermaksud mengangkat permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau?
2. Apakah penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah?
3. Apa hambatan dalam penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua ?

1.3 Batasan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan mengenai Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua maka penulis membatasi penelitiannya hanya seputar :

1. Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA)
2. Fokus dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Tahun 2019

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau
2. Untuk mengetahui penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau apakah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
3. Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Ilmiah

Dari penelitian ini diharapkan akan menambah referensi bagi penelitian selanjutnya serta menjadi sumbangan pemikiran bagi peneliti lainnya yang ingin meneliti lebih dalam dilihat dari sudut pandang yang berbeda mengenai Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI

1.5.2 Kegunaan Praktis

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis, menambah wawasan dan pengalaman bagi penulis tentang Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA)
2. Bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, sebagai bahan informasi terkait Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI

(SAIBA) sebagai Implementasi PP Nomor 71 Tahun 2010 dalam penyusunan Laporan Keuangan

3. Bagi Pembaca, sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini diajukan 5 bab yang diawali hal-hal yang bersifat umum, namun keseluruhannya saling berhubungan dengan penulisan yang disajikan dan kemudian pada bab-bab selanjutnya penulis membahas tentang hal-hal yang berkaitan langsung dengan judul sehingga memudahkan pemahaman bagi para pembaca. Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum dari masalah penelitian yang dilakukan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori, baik teori dasar maupun teori tambahan yang menunjang dan berhubungan dengan pokok permasalahan, yang digunakan sebagai pedoman atau landasan konseptual pemecahan masalah yang berhubungan dengan judul penelitian yang diambil, kerangka pemikiran, dan penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Meliputi gambaran umum objek penelitian, penyajian data, analisis hasil penelitian serta pembahasan masalah.

BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Akuntansi Sektor Publik

Dalam ilmu akuntansi komponen akuntansi dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu akuntansi non-publik dan akuntansi publik. Akuntansi sektor publik adalah sebuah proses untuk mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasikan, menganalisis, serta membuat laporan transaksi keuangan untuk sebuah organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi pihak yang membutuhkannya untuk digunakan saat pengambilan sebuah keputusan. Akuntansi sektor publik jelas berbeda dengan akuntansi sektor swasta atau non-publik.

Instansi merupakan bagian dari organisasi, dimana organisasi adalah sekelompok orang yang bekerjasama secara terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu atau sejumlah sasaran yang telah ditetapkan bersama. Setiap organisasi mempunyai tujuan spesifik yang hendak dicapai dan memerlukan manajemen yang baik agar bisa mencapai tujuan tersebut. Tujuan organisasi tersebut dapat bersifat kualitatif atau kuantitatif yang dapat dibagi lagi menjadi tujuan yang bersifat *financial* maupun *non-financial*.

Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Dalam beberapa hal, organisasi sektor publik memiliki kesamaan dengan sektor swasta. Keduanya menggunakan sumber daya yang sama dalam mencapai

tujuannya dan memiliki kemiripan dalam proses pengendalian. Akan tetapi, untuk tugas tertentu keberadaan sektor publik tidak dapat digantikan oleh sektor swasta, misalnya fungsi birokrasi pemerintahan.

Istilah sektor publik sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik (Mardiasmo, 2018).

Sedangkan (Abdul Halim, 2013) mengemukakan bahwa akuntansi sektor publik merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Selain itu menurut (Indra Bastian, 2010) yang dikutip dari salah satu literturnya mendefinisikan bahwa akuntansi sektor publik atau akuntansi pemerintahan merupakan mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di berbagai lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah dan lainnya.

Sektor publik ini tidak terlepas dari sejarah, hal ini dapat kita ketahui dari (Mahsun, 2011). Awalnya sektor publik ini muncul karena ada kebutuhan masyarakat secara bersamaan terhadap barang dan layanan tertentu. Untuk menghindari terjadinya alokasi dan distribusi barang atau layanan umum yang

tidak adil maka pengaturan pengalokasian dan pendistribusiannya diserahkan kepada pengurus tertentu. Kemudian masyarakat membayar sejumlah upeti (pajak) untuk mendukung pengaturan barang atau layanan umum oleh pengurus tersebut.

Dapat kita ketahui berdasarkan definisi–definisi yang dikutip dari berbagai literatur tersebut maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, menganalisa, dan pelaporan transaksi keuangan suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan.

2.1.2 Laporan Keuangan Pemerintah

Menurut(Peraturan Pemerintah Nomor 71, 2010) pengertian laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

2.1.3 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah

Secara umum tujuan laporan keuangan pemerintah diantaranya sebagai kepatuhan dan pengelolaan (*compliance and stewardship*). Selain itu sebagai akuntabilitas dan pelaporan secara retrospektif, perencanaan, dan informasi, kelangsungan organisasi dan hubungan masyarakat serta sebagai sumber fakta dan gambaran. Pada kepatuhan dan pengelolaan disini dimaksud adalah laporan keuangan yang digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas dan pelaporan yang retrospektif bermakna bahwa laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati trend antara kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada, laporan keuangan juga memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima, serta memungkinkan bagi mereka untuk menilai efesiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya organisasi.

Berdasarkan (Peraturan Pemerintah Nomor 71, 2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyatakan bahwa tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
3. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
4. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

2.1.4 Perkembangan Akuntansi Pada Pemerintah

Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) yang disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga merupakan salah satu bentuk akuntabilitas dalam mewujudkan *good governance*. LKKL yang disusun pada tahun 2005 sebagai bentuk pertanggungjawaban APBN tahun 2004, merupakan LKKL pertama kali yang dihasilkan menteri/ pimpinan lembaga. Penyusunan LKKL berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). LKKL tahun 2004-2014 dihasilkan dari Sistem Akuntansi Keuangan Pengguna Anggaran (SAKPA) dengan basis *Cash Towards Accrual* (CTA). Terdapat perbedaan penyajian laporan keuangan pemerintah dari SAP Kas menuju akrual dan SAP Akrual seperti dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1

Perbedaan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah

SAP Kas Menuju Akrual dan SAP Akrual

Keterangan	SAP Kas Menuju Akrual	SAP Akrual
Komponen Laporan Keuangan	Laporan Keuangan pokok : (LRA, Neraca, LAK, CALK) Laporan Operasional : (Laporan Kinerja Keuangan, Laporan Perubahan Ekuitas)	Laporan Keuangan Pokok (LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Lap. Operasional, LAK, LPE, CALK)
Laporan Realisasi Anggaran	Diperlukan dalam rangka memenuhi kewajiban pemerintah yang diatur dalam perundangan.	Tetap diperlukan memenuhi kewajiban pemerintah yang diatur dalam perundangan.
Laporan Perubahan	Tidak ada laporan tersendiri.	Laporan Perubahan SAL

Keterangan	SAP Kas Menuju Akrual	SAP Akrual
SAL		<p>menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut</p> <p>Saldo anggaran lebih awal, saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan, anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan lain-lain, saldo anggaran lebih akhir.</p>
Neraca	<p>Akun ekuitas disebut sebagai ekuitas dana yang terbagi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ekuitas dana lancar yaitu selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek, termasuk sisa lebih pembiayaan anggaran/saldo anggaran lebih. 2. Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam 	<p>Tidak lagi disebut ekuitas dana, hanya ekuitas, yaitu kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo ekuitas pada laporan perubahan ekuitas.</p>

Keterangan	SAP Kas Menuju AkruaI	SAP AkruaI
	<p>investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.</p> <p>3. Ekuitas dana cadangan yaitu, mencerminkan kekayaan pemerintahan yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	
Laporan Arus Kas	<p>1. Disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan</p> <p>2. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran</p>	<p>1. Disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.</p> <p>2. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.</p>
Laporan Operasional	<p>1. Bersifat operasional</p> <p>2. Disusun oleh entitas pelaporan yang</p>	Merupakan laporan keuangan pokok

Keterangan	SAP Kas Menuju AkruaI	SAP AkruaI
	menyajikan laporan berbasis akruaI	
Laporan Perubahan Ekuitas	Bersifat operasional	Merupakan laporan keuangan pokok
Catatan atas Laporan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disajikan secara sistematis, setiap pos dalam LRA, Neraca, dan LAK harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan 2. CALK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca dan LAK 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disajikan secara sistematis setiap pos dalam LRA, laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam CALK. 2. CALK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO,LAK, dan LPE.

Sumber : Ratmono, Dwi, dan Mahfud Sholihin, 2015. Akuntansi keuangan Daerah. Yogyakarta :UPP STIM YKPN

Peralihan dari kas basis ke akruaI basis. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyatakan bahwa Pemerintah menerapkan SAP berbasis akruaI (Pasal 4 ayat 1).

SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Penerapan SAP berbasis akrual sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 ayat 1 dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP berbasis kas menuju akrual menjadi penerapan SAP berbasis akrual. SAP berbasis kas menuju akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Tujuan dari peralihan laporan keuangan dari yang berbasis kas menuju berbasis akrual adalah untuk membuat penilaian riil terhadap kinerja pemerintahan menjadi transparan, akuntabel dan *real time*.

2.1.5 Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebagai barisan terdepan dalam implementasi akuntansi berbasis akrual telah mengembangkan aplikasi akuntansi yang selama ini telah digunakan dalam basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) yaitu aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan Pengguna Anggaran (SAKPA) menjadi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA). Aplikasi SAIBA merupakan sistem akuntansi keuangan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) berbasis akrual. Mengingat sejak 2005 sampai 2014 aplikasi SAKPA telah digunakan oleh Kementerian Negara/ Lembaga dalam menyusun laporan

keuangannya, sehingga dapat dikatakan semua satuan kerja telah familiar dengan aplikasi tersebut.

Pengembangan SAI menjadi SAIBA merupakan terobosan aplikasi akuntansi berbasis akrual yang diharapkan memenuhi kebutuhan informasi laporan keuangan yang disyaratkan oleh SAP. Aplikasi SAKPA harus dimodifikasi sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan berbasis akrual berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca. SAIBA dibangun dengan harapan operator tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan aplikasi SAIBA karena SAIBA adalah pengembangan dari SAKPA. Aplikasi ini mulai digunakan untuk penyusunan laporan keuangan bulan Januari 2015.

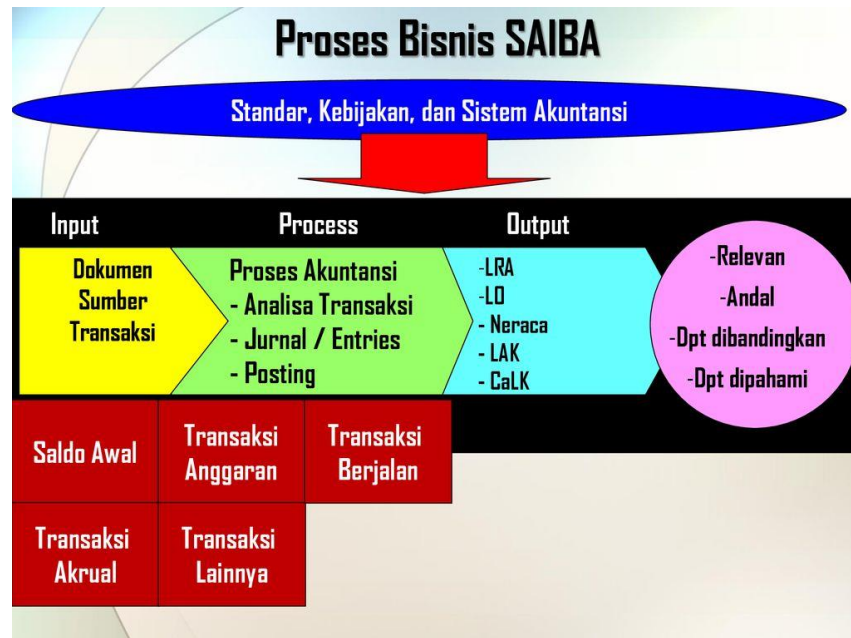
Tujuan dari sistem akuntansi instansi berbasis akrual, yaitu:

1. Menjadi pedoman penyusun laporan keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga untuk melaksanakan akuntansi berbasis akrual pada masa transisi atau awal implementasi.
2. Menciptakan keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan, sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan pada tingkat satuan kerja wilayah, tingkat eselon 1 dan tingkat Kementerian Negara/Lembaga.

Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual merupakan salah satu aplikasi keuangan negara digunakan oleh satuan kerja untuk keperluan proses bisnis pencatatan transaksi anggaran dan pembayaran satuan kerja yang kemudian akan digunakan sebagai dokumen rekonsiliasi di tahun anggaran. Proses Akuntansi pada Entitas Akuntansi seperti Gambar 2.2

Gambar 2.2

Proses Akuntansi pada Entitas Akuntansi



Sumber: [https://slideplayer.info/slide/13954969/Presentasi berjudul: "Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan"](https://slideplayer.info/slide/13954969/Presentasi%20berjudul%3A%20\)

Dokumen sumber akuntansi merupakan input dalam proses akuntansi. Dokumen sumber ini terdiri dari dokumen internal maupun dokumen eksternal. Dokumen internal merupakan dokumen yang dibuat sendiri oleh entitas akuntansi (satuan kerja) untuk merekam data yang sumbernya dari dalam atau tidak ada bukti dari pihak eksternal. Data yang diproses meliputi data saldo awal neraca atau data realisasi anggaran periode sebelumnya, data anggaran berupa anggaran pendapatan dan anggaran belanja yang dialokasikan kepada setiap satuan kerja, transaksi tahun berjalan meliputi penerimaan dan pengeluaran kas, transaksi akrual meliputi pendapatan dan beban akrual, dan transaksi lainnya. Transaksi lainnya antara lain meliputi transaksi keuangan yang tidak memengaruhi pendapatan dan beban, seperti terjadinya reklasifikasi pos-pos pada neraca.

2.1.6 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maka Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 dengan perihal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun meski sudah dinyatakan tidak berlaku substansi Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 masih dilaksanakan dalam rangka transisi penyusunan laporan keuangan berbasis kas menuju akrual (*Cash Toward Accrual*) kepada penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Berikut ini beberapa pengertian standar akuntansi pemerintahan menurut para ahli:

Menurut (Rachmat, 2010) Akuntansi pemerintahan adalah pemahaman akuntansi pemerintah yang sering dicampuradukkan dengan kekuasaan dan politik sehingga pengertiannya menjadi kabur dan tidak logis. Meskipun setiap orang bebas memberikan pengertian akuntansi pemerintahan menurut pendekatannya masing-masing.

Menurut (Suwanda Danang & Hendri, 2014) menyatakan bahwa SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan di Indonesia. Akuntansi berbasis akrual mampu mendukung terlaksananya perhitungan biaya pelayanan publik yang lebih wajar dan mampu menghasilkan informasi yang lebih akuntabel.

Menurut (Mahmudi, 2010) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengenai basis akuntansi adalah dasar

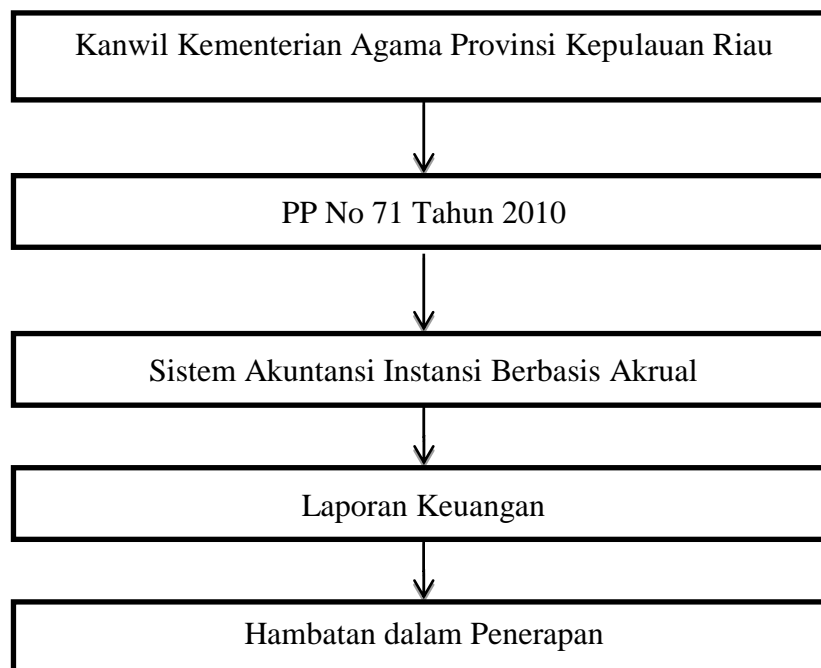
akuntansi yang menetapkan kapan suatu transaksi diakui atau dicatat. Pengakuan atau pencatatan transaksi tersebut akan berpengaruh pada laporan keuangan. Jika suatu transaksi sudah diakui, maka transaksi itu akan dicatat dalam sistem akuntansi dalam laporan keuangan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Untuk lebih memudahkan dalam proses analisis permasalahan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka kerangka pemikiran penelitian sebagaimana terlihat pada gambar 2.1

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Penelitian



Sumber : Peneliti, 2020

2.3 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Judul	Metode Penelitian	Hasil
1.	Sari Zawitri, Ninik Kurniasih, Theresia Siwi Kartikawati, 2015	Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual Sebagai Implementasi PP No.71 Tahun 2010 pada Politeknik Negeri Pontianak	Kualitatif	Rekonstruksi bentuk Laporan Keuangan Politeknik Negeri Pontianak sesuai dengan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual sebagai bentuk im- plementasi PP 71 Tahun 2010 dengan penambah- an Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.
2.	Iput Dyah Susanti, Muhammad Ahyarudin, dan Muhammad Hidayat, 2016	Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dalam Penyajian Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Badan Narkotika	Kualitatif	Penerapan SAIBA telah mengikuti prosedur yang ada di PMK 270/PMK- 05/2014 mulai dari migrasi saldo awal, perekaman dokumen sumber berupa DIPA, dan perekaman dokumen transaksi belanja yang berasal dari SPP, SPM, dan SP2D

No	Penelitian	Judul	Metode Penelitian	Hasil
		Nasional Provinsi Riau)		
3.	Ida Najati, Endar Pituriningsih, Animah, 2016	Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual : Pengujian Determinan dan Implikasinya terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Kuantitatif	Penggunaan aplikasi SAIBA tidak berpengaruh terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual sebab kurangnya pengetahuan operator tentang penyusunan jurnal penyesuaian dan pengembangan aplikasi SAIBA yang tidak melibatkan pengguna. Pelatihan akuntansi berpengaruh terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual. Budaya organisasi berpengaruh terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual
4	Arieffin Dian Permana, 2016	Penerapan Aplikasi SAIBA Untuk Penyusunan Laporan Keuangan	Kualitatif	Kekurangan dalam ap- likasi ini pasti berhu- bungan dengan kestabil- an (<i>settled</i>) dari aplikasi itu sendiri. Aplikasi ini sangat membantu dalam rangka penyusunan laporan keuangan Kantor Pelayanan Pajak Pratama

No	Penelitian	Judul	Metode Penelitian	Hasil
5	Apriliyana Hasri, Akram, 2017	<i>Determinants of Succesfull Implementatio n Of Accrual Based Accounting System For Government</i>	Kuantitatif	Kompetensi SDM tidak memengaruhi kompetensi implementasi SAP berbasis akrual mungkin karena persiapan laporan keuangan dilakukan dengan bantuan aplikasi sehingga pendidikan latar belakang dan pemahaman dasar tentang ilmu akuntansi tidak memengaruhi proses penyusunan laporan keuangan. Yang dibutuhkan adalah kemampuan mengoperasikan komputer untuk mengelola aplikasi

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Penelitian deskriptif, dilakukan untuk menguraikan aspek-aspek fenomena atau karakteristik variabel atau obyek yang menarik untuk diteliti. Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami karakteristik objek yang diteliti, atau menyusun profil objek, atau membantu membuat keputusan-keputusan sederhana seperti jumlah, proporsi, rata-rata, atau trend.

Menurut (Zulganef, 2018: 9) penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu kondisi atau fenomena tertentu, tidak memilah-milah atau mencari faktor-faktor atau variabel tertentu.

Menurut (Lexy, 2011) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

3.2 Jenis Data

3.2.1 Data Primer

Menurut (Danang, 2013:21) data primer merupakan data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus, pada umumnya seseorang peneliti harus melakukan pengumpulan sendiri data ini berdasarkan kebutuhannya.

Menurut (Kuncoro, 2018:38) data primer adalah data yang dihimpun, disusun, diolah, dan disajikan 'sendiri' oleh peneliti. Sedangkan menurut (Rianto, 2013:12) data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri terhadap sasaran/responden.

Pada objek penelitian ini peneliti mengambil data primer yaitu wawancara langsung dengan operator Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akual (SAIBA) dan *check list* penyajian laporan keuangan

3.2.2 Data Sekunder

Menurut (Rianto, 2013:14) data sekunder adalah data yang diambil dari orang lain atau tempat lain dan bukan dilakukan oleh peneliti sendiri, biasanya data itu sudah dikompilasi lebih dahulu oleh instansi atau orang yang memiliki data tersebut.

Menurut (Sugiyono, 2012) data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Menurut (Danang, 2013) data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Pada objek penelitian ini peneliti mengambil data sekunder yaitu Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data atau keterangan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap penelitian harus menggunakan metode pengumpulan data yang merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data itu antara lain:

1. *Interview* (Wawancara)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara bebas baik terstruktur maupun tidak terstruktur kepada pihak yang memiliki pengetahuan mengenai masalah penelitian dengan tujuan untuk memperoleh informasi secara luas mengenai objek penelitian yang diambil.

2. Observasi

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan cara turun langsung pada lokasi penelitian untuk mengetahui dan mengamati fenomena yang terjadi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau dengan lebih jelas.

3. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Metode pengumpulan data ini digunakan untuk mendapatkan keterangan yang lebih akurat dan jelas mengenai Sistem Akuntansi Instansi Berbasis

Akrual serta mengetahui metode-metode apa saja yang bisa digunakan dalam penelitian ini.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu penelitian dengan mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menganalisis data. Terdapat empat macam kegiatan analisa data kualitatif yaitu:

1. Pengumpulan Data

Proses pengambilan data kualitatif dilakukan dengan cara pengamatan dan wawancara kepada narasumber pada tempat penelitian, serta pengambilan terhadap data yang sudah jadi dalam bentuk file pdf, laporan keuangan, dan aplikasi SAIBA.

2. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilahan, merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan kepada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

3. Penyajian Data

Penyajian data (*display data*) dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan, hal ini merupakan pengorganisasian data kedalam suatu bentuk tertentu sehingga

kelihatan jelas bentuknya dan kelihatan utuh. Data tersebut kemudian dipilah-pilah dan disisikan untuk dibagi menurut kelompok dan disusun sesuai kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi.

4. Penarikan Kesimpulan

Memberikan kesimpulan atas hasil analisis yang telah dilakukan.

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini, adalah :

1. Mengumpulkan dan mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku serta buku-buku dan jurnal-jurnal terkait
2. Menganalisis kesesuaian laporan keuangan yang tersedia di aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
3. Wawancara dengan operator SAIBA semua satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau apa yang menjadi kendala sebagai operator dalam penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA), lalu menarik kesimpulan dari pernyataan wawancara tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Amriani. (2014). *Menyongsong Penerapan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual*.
- Danang, Sunyoto. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: PT Refika. Aditama Anggota IKAPI.
- Danang, Suwanda, & Hendri, S. (2014). *Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Berpedoman pada SAP*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Indra Bastian. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, H. (2018). *Statistika Deskriptif untuk Analisis Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lexy, M. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Renaja Rosdakarya.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mahsun, M. (2011). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Mardiasmo, ed.). Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71. *Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. , (2010).
- PPAKP. (2014). *Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah*.
- Rachmat. (2010). *Akuntansi Pemerintahan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Rianto, A. (2013). *Statistik Deskriptif*. Yogyakarta: Nuha Medika.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:

Alfabeta.

Zulganef. (2018). *Metode Penelitian Bisnis dan Manajemen*. Bandung: PT Refika

Aditama.

Keputusan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 *tentang Organisasi dan Tata*

Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama

CURRICULUM VITAE



Nama : Bernadet Nauli Marbun
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Tanjungpinang, 24 Agustus 1998
Status : Belum Menikah
Agama : Katolik
Email : bernadetnauli.tpi@gmail.com
Alamat : Perumahan Lembah Asri Blk. B 2 No. 7
Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang
Timur, Kota Tanjungpinang
Pendidikan : - SD Negeri 004 Tanjungpinang
- SMP Negeri 7 Tanjungpinang
- SMK Negeri 1 Tanjungpinang
- STIE Pembangunan Tanjungpinang